

## Strategi Pendistribusian Logistik Pemilu Surat Suara Ke Luar Negeri Pada Pemilu 2024

M. Athaillah Akbar Iskandar<sup>1</sup>, Rizky Hidayat<sup>2</sup>, Jaap Fernando Usyor<sup>3</sup>, Syarif Indrawan Patara<sup>4</sup>, Jona Basuki Sinaga<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri

<sup>1</sup>[athaillahiskandar10@gmail.com](mailto:athaillahiskandar10@gmail.com), <sup>2</sup>[riskyh36@gmail.com](mailto:riskyh36@gmail.com), <sup>3</sup>[jaapusyor1313@gmail.com](mailto:jaapusyor1313@gmail.com),

<sup>4</sup>[syarifre3@gmail.com](mailto:syarifre3@gmail.com), <sup>5</sup>[jonasinaga@ipdn.ac.id](mailto:jonasinaga@ipdn.ac.id)

---

**ABSTRACT;** *The 2024 elections in Indonesia include a complex process of distributing election logistics, including ballot papers abroad. This distribution aims to ensure the participation of Indonesian citizens (WNI) abroad in an effective, efficient and timely manner. This research aims to analyze election logistics distribution strategies, identify challenges, and formulate recommendations to increase distribution effectiveness. The methodology used is a qualitative approach with primary and secondary data analysis. Primary data was obtained through interviews with key stakeholders, such as the General Election Commission (KPU), Overseas Election Committee (PPLN), and logistics service providers. Meanwhile, secondary data was obtained from official documents, previous election reports, and related academic studies. The research results show that the main challenges in distributing ballot papers abroad include time constraints, geographical constraints, regulatory obstacles in the destination country, as well as logistical security risks. To overcome these challenges, an effective strategy involves the use of information technology in logistics tracking, collaboration with trusted third parties, strengthening coordination between the KPU and PPLN, as well as mitigating risks through logistics insurance and optimal time management. The conclusion of this research is the importance of synergy between the government, logistics service providers and the community to ensure the successful distribution of ballot papers abroad. The proposed strategic recommendations can serve as a guide for implementing the 2024 elections better and with integrity.*

**Keywords:** *2024 Election, Election Logistics, Ballot Papers, International Distribution, Logistics Strategy.*

**ABSTRAK;** *Pemilu 2024 di Indonesia mencakup proses pendistribusian logistik pemilu yang kompleks, termasuk surat suara ke luar negeri. Pendistribusian ini bertujuan memastikan partisipasi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri secara efektif, efisien, dan tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pendistribusian logistik pemilu, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas distribusi. Metodologi yang digunakan adalah*

pendekatan kualitatif dengan analisis data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan utama, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan penyedia jasa logistik. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan pemilu sebelumnya, serta kajian akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pendistribusian surat suara ke luar negeri meliputi keterbatasan waktu, kendala geografis, hambatan regulasi di negara tujuan, serta risiko keamanan logistik. Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi yang efektif melibatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelacakan logistik, kolaborasi dengan pihak ketiga terpercaya, penguatan koordinasi antara KPU dan PPLN, serta mitigasi risiko melalui asuransi logistik dan pengelolaan waktu yang optimal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya sinergi antara pemerintah, penyedia jasa logistik, dan masyarakat untuk menjamin keberhasilan pendistribusian surat suara ke luar negeri. Rekomendasi strategis yang diajukan dapat menjadi panduan untuk pelaksanaan Pemilu 2024 yang lebih baik dan berintegritas.

**Kata Kunci:** Pemilu 2024, Logistik Pemilu, Surat Suara, Distribusi Internasional, Strategi Logistik.

---

## **PENDAHULUAN**

Pemilu adalah salah satu sarana demokrasi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemilu tidak hanya berfungsi untuk memilih pemimpin, tetapi juga untuk memastikan partisipasi aktif seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) dalam proses politik, termasuk mereka yang berada di luar negeri. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah WNI yang tinggal di luar negeri terus meningkat seiring dengan perkembangan globalisasi dan mobilitas internasional. Hal ini membuat partisipasi WNI di luar negeri dalam Pemilu menjadi semakin signifikan, namun juga penuh tantangan, terutama dalam hal distribusi logistik pemilu, khususnya surat suara.

Pada Pemilu 2024, tantangan pendistribusian surat suara ke luar negeri diperkirakan akan lebih besar dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Proses pendistribusian surat suara ini tidak hanya membutuhkan efisiensi, tetapi juga keamanan dan kecepatan, mengingat keterbatasan waktu serta kompleksitas regulasi di setiap negara tempat WNI berada. Pendistribusian surat suara harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan faktor-faktor seperti keterjangkauan geografis, perbedaan sistem logistik di setiap negara, serta potensi gangguan eksternal yang bisa memengaruhi kelancaran distribusi. Oleh

karena itu, perencanaan dan implementasi strategi logistik yang tepat menjadi sangat penting agar proses pemungutan suara di luar negeri dapat berjalan dengan lancar dan sesuai jadwal.

Selain itu, masalah pengelolaan logistik pemilu di luar negeri turut dipengaruhi oleh kurangnya pengalaman dalam pendistribusian surat suara di luar negeri pada Pemilu sebelumnya, yang kadang mengalami keterlambatan, kerusakan, atau bahkan hilangnya surat suara. Hal ini tentu berdampak pada kualitas dan kredibilitas hasil pemilu. Strategi distribusi logistik yang tidak efektif juga dapat mengurangi tingkat partisipasi WNI di luar negeri, yang pada akhirnya mempengaruhi representasi suara mereka dalam hasil pemilu. Menghadapi berbagai tantangan ini, penting untuk merumuskan strategi distribusi logistik yang terstruktur dan terkoordinasi dengan baik. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah pemilihan mitra logistik yang tepat, penggunaan teknologi untuk pelacakan surat suara, serta pembentukan jaringan komunikasi yang efisien antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), serta penyedia jasa logistik internasional. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan terkait dengan pendistribusian surat suara untuk memastikan kelancaran dan keamanan pengiriman ke luar negeri.

Sejak pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia, masalah logistik telah menjadi tantangan signifikan yang berulang pada setiap siklus pemilu. Menurut laporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), terdapat berbagai kendala dalam pengadaan dan distribusi logistik, seperti keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, dan ketidakakuratan jumlah logistik yang diterima di lokasi pemungutan suara (TPS). Dalam konteks pemilu 2024, tantangan ini semakin kompleks karena melibatkan distribusi logistik ke luar negeri untuk WNI yang berhak memberikan suara. Pendistribusian logistik pemilu ke luar negeri menghadapi sejumlah tantangan unik. Diantaranya adalah faktor geografis yang membuat akses ke lokasi TPS di luar negeri menjadi sulit. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak menentu juga dapat mempengaruhi ketepatan waktu pengiriman logistik. Kualitas dan kuantitas logistik yang diterima oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan, seperti kelebihan atau kekurangan surat suara.

Hal ini menunjukkan perlunya sistem manajemen logistik yang lebih baik dan terintegrasi agar distribusi dapat dilakukan secara efisien. Selain itu, masalah koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam distribusi logistik juga menjadi tantangan. Keterlibatan banyak lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri dan PT Pos Indonesia sebagai distributor utama, memerlukan komunikasi dan kolaborasi yang efektif untuk menghindari kesalahan dalam proses distribusi. Sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan baik berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi pendistribusian logistik surat suara ke luar negeri pada Pemilu 2024. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas distribusi logistik pemilu di luar negeri, serta memastikan seluruh WNI di luar negeri dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Koordinasi Lembaga Pemerintahan dalam proses distribusi logistik pemilu surat suara ke luar negeri?
2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pendistribusian logistik pemilu surat suara ke luar negeri?

### **Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Koordinasi Lembaga pemerintah dalam pendistribusian logistik pemilu surat suara ke luar negeri
2. Menganalisis tantangan utama yang dihadapi dalam pendistribusian logistik pemilu surat suara ke luar negeri.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur review yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis strategi pendistribusian logistik pemilu, khususnya surat suara, ke luar negeri pada Pemilu 2024. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk memahami teori,

konsep, dan temuan-temuan sebelumnya terkait dengan distribusi logistik pemilu internasional, serta bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pendistribusian surat suara di luar negeri.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh dari sumber-sumber literatur yang relevan. Sumber data yang digunakan meliputi:

1. **Artikel Jurnal:** Kajian akademik dan artikel yang membahas distribusi logistik dalam konteks pemilu internasional, termasuk tantangan, strategi, dan kebijakan yang telah diterapkan pada pemilu sebelumnya, baik di Indonesia maupun negara lain.
2. **Laporan dan Dokumen Resmi:** Dokumen yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), serta lembaga terkait lainnya yang memuat informasi mengenai pelaksanaan distribusi logistik pemilu pada Pemilu sebelumnya.
3. **Buku dan Monograf:** Buku atau monograf yang mengulas topik-topik terkait dengan manajemen logistik, distribusi internasional, serta pemilu luar negeri.
4. **Sumber Daring dan Laporan Organisasi Internasional:** Publikasi dan laporan dari organisasi internasional, seperti PBB, yang membahas praktik terbaik dan standar internasional dalam pendistribusian logistik pemilu, serta studi kasus dari negara lain yang memiliki pengalaman serupa.

### **Proses Pengumpulan Data**

Dalam pendekatan literatur review, proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menilai, dan menyaring literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tahapan pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup:

1. **Pencarian Literatur:** Mencari literatur terkait melalui database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ProQuest, serta sumber-sumber terkait lainnya yang relevan dengan topik penelitian.
2. **Seleksi Sumber:** Memilih literatur yang paling relevan dan terbaru mengenai distribusi logistik pemilu internasional, tantangan yang dihadapi dalam pendistribusian

surat suara ke luar negeri, serta pengalaman dari pemilu sebelumnya. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan kriteria kualitas dan kredibilitas sumber.

3. **Analisis dan Sintesis:** Mengkaji, menganalisis, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai literatur untuk mengidentifikasi pola-pola utama, konsep-konsep yang berulang, dan strategi yang telah terbukti efektif dalam distribusi logistik pemilu ke luar negeri.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari literatur yang telah dipilih kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik **analisis tematik**. Analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. **Kategorisasi:** Mengelompokkan temuan-temuan yang berkaitan dengan topik utama penelitian, seperti strategi logistik, tantangan distribusi surat suara ke luar negeri, peran teknologi dalam pelacakan logistik, serta kebijakan dan regulasi yang mendukung distribusi.
2. **Identifikasi Tema dan Pola:** Menganalisis pola-pola yang muncul dari berbagai sumber literatur, seperti tantangan yang dihadapi dalam pendistribusian logistik internasional, serta rekomendasi untuk perbaikan pada Pemilu 2024.
3. **Sintesis dan Interpretasi:** Menggabungkan hasil analisis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat memberikan wawasan mengenai strategi distribusi logistik yang lebih efektif, serta penerapannya pada Pemilu 2024.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Koordinasi Lembaga Pemerintahan dalam Proses Distribusi Logistik Pemilu Surat Suara ke Luar Negeri**

Distribusi logistik pemilu, khususnya surat suara ke luar negeri, merupakan tantangan besar yang melibatkan banyak pihak dan lembaga pemerintah. Proses ini membutuhkan koordinasi yang efektif antar berbagai institusi untuk memastikan bahwa distribusi berlangsung lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Koordinasi antar lembaga pemerintahan memiliki peran yang sangat krusial dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam distribusi logistik pemilu internasional. Dalam konteks Pemilu 2024, beberapa lembaga utama yang terlibat dalam koordinasi

distribusi logistik pemilu ke luar negeri antara lain adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), serta penyedia jasa logistik dan transportasi.

**1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

KPU adalah lembaga utama yang bertanggung jawab dalam merencanakan dan mengelola seluruh aspek pemilu, termasuk distribusi logistik pemilu ke luar negeri. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemilu, KPU memiliki peran penting dalam menetapkan jadwal distribusi, mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga lain, serta memastikan bahwa seluruh logistik pemilu, termasuk surat suara, sampai ke tempat tujuan dengan aman. Koordinasi KPU dengan lembaga lain dilakukan melalui koordinasi reguler, rapat teknis, dan pembuatan prosedur distribusi yang jelas. Pada Pemilu 2024, KPU berperan untuk merancang jadwal distribusi surat suara yang mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman, peraturan di negara tujuan, serta potensi risiko yang mungkin timbul selama proses distribusi. KPU juga berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) untuk memastikan bahwa surat suara dapat diterima dan didistribusikan dengan tepat kepada pemilih di luar negeri.

**2. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)**

PPLN adalah lembaga yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan pemilu di luar negeri. PPLN berperan penting dalam menerima, menyimpan, dan mendistribusikan surat suara kepada WNI yang berada di luar negeri. Tugas PPLN tidak hanya terbatas pada pendistribusian logistik, tetapi juga melibatkan koordinasi dengan pihak-pihak lain, seperti perwakilan Indonesia di luar negeri dan penyedia jasa logistik. PPLN bertanggung jawab untuk memastikan bahwa logistik yang diterima dari KPU dapat segera disalurkan kepada TPS (Tempat Pemungutan Suara) di luar negeri. Proses ini melibatkan komunikasi intensif dengan KPU, Kedutaan Besar, Konsulat, serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi tantangan spesifik yang mungkin terjadi, seperti keterlambatan pengiriman, kendala administratif, atau kondisi geopolitik di negara penerima.

### **3. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)**

Kemenlu memiliki peran sentral dalam proses distribusi logistik pemilu ke luar negeri, khususnya dalam hal diplomasi dan koordinasi antarnegara. Kemenlu berkoordinasi dengan negara tempat WNI berada untuk memastikan tidak ada kendala administratif atau hukum dalam pengiriman logistik pemilu, seperti pembatasan impor, pajak, atau persyaratan izin. Selain itu, Kemenlu juga bekerja sama dengan Kedutaan Besar dan Konsulat Republik Indonesia di luar negeri untuk membantu memfasilitasi distribusi surat suara dan memastikan keberhasilan pemungutan suara. Kemenlu memastikan bahwa semua prosedur administratif dipatuhi, serta membantu dalam hal pengamanan dan pengawasan distribusi.

### **4. Penyedia Jasa Logistik**

Penyedia jasa logistik atau perusahaan ekspedisi memiliki peran penting dalam memastikan surat suara dikirim dengan aman dan tepat waktu ke luar negeri. Dalam proses ini, perusahaan logistik yang bekerja sama dengan KPU dan PPLN harus memiliki jaringan yang luas dan kemampuan untuk menangani pengiriman internasional dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan waktu pengiriman. Penyedia jasa logistik juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kelancaran distribusi, serta untuk memberikan update atau pelaporan terkait status pengiriman. Penyedia jasa logistik harus bekerja sama dengan KPU dan PPLN dalam hal memilih jalur distribusi yang paling efisien dan aman, dengan memperhatikan kondisi negara tujuan yang bisa berpengaruh pada kecepatan dan keamanan pengiriman surat suara. Di beberapa negara dengan infrastruktur yang kurang memadai atau di kawasan yang rawan konflik, penyedia jasa logistik harus memiliki rencana cadangan untuk memastikan surat suara sampai dengan aman.

### **5. Koordinasi Antar Lembaga**

Proses distribusi logistik pemilu ke luar negeri memerlukan koordinasi yang sangat erat antara semua pihak yang terlibat. Komunikasi yang jelas, penjadwalan yang tepat, serta pembagian tugas yang terstruktur sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan distribusi. Dalam konteks ini, KPU sebagai koordinator

utama harus dapat menjalin komunikasi yang baik dengan PPLN, Kemenlu, dan penyedia jasa logistik untuk mengatasi segala tantangan yang muncul.

Beberapa aspek koordinasi yang perlu diperhatikan antara lain:

- **Penjadwalan Pengiriman:** Menetapkan waktu yang cukup untuk distribusi logistik agar surat suara sampai tepat waktu.
- **Penanganan Kendala:** Menghadapi hambatan-hambatan yang muncul, baik yang terkait dengan regulasi negara tujuan, permasalahan logistik, ataupun situasi darurat.
- **Pelaporan dan Evaluasi:** Menyusun mekanisme pelaporan yang baik antara lembaga-lembaga terkait, baik secara rutin maupun darurat, untuk memastikan progres distribusi berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

### **Tantangan Utama dalam Pendistribusian Logistik Pemilu Surat Suara ke Luar Negeri**

Pendistribusian logistik pemilu, terutama surat suara, ke luar negeri menghadapi sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pemilu bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Mengingat kompleksitas dan skala distribusi yang melibatkan banyak negara dengan kondisi geografis, sosial, dan politik yang beragam, tantangan-tantangan ini perlu dikelola dengan baik agar proses pemilu tetap berjalan efektif dan tepat waktu. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pendistribusian logistik pemilu surat suara ke luar negeri antara lain:

#### **1. Keterbatasan Waktu dan Jangka Waktu Pengiriman**

Salah satu tantangan terbesar dalam pendistribusian surat suara ke luar negeri adalah keterbatasan waktu. Pemilu memiliki jadwal yang ketat, dan surat suara harus sampai ke luar negeri tepat waktu agar dapat didistribusikan kepada WNI yang berhak memilih. Proses pengiriman surat suara internasional membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melalui prosedur bea cukai, pengamanan, serta pengiriman antarnegara. Selain itu, beberapa negara tujuan memiliki waktu pengiriman yang lebih lama karena jarak yang jauh atau terbatasnya infrastruktur logistik yang memadai. Masalah ini semakin kompleks mengingat perbedaan waktu yang ada di setiap negara, serta kendala logistik yang mungkin terjadi, seperti cuaca

buruk, masalah di bandara atau pelabuhan, dan regulasi lokal yang membatasi pengiriman. Oleh karena itu, KPU dan PPLN harus bekerja dengan waktu yang sangat terbatas dan memastikan surat suara dapat sampai ke lokasi pemungutan suara (TPS) di luar negeri sesuai dengan jadwal.

## **2. Kendala Geografis dan Infrastruktur Logistik**

Distribusi surat suara ke luar negeri melibatkan pengiriman antarnegara dengan jarak yang bervariasi. Negara-negara yang berada jauh dari Indonesia, atau yang memiliki infrastruktur logistik yang kurang berkembang, menghadapi tantangan lebih besar dalam hal waktu dan biaya pengiriman. Di beberapa wilayah, terutama di negara-negara dengan infrastruktur transportasi yang terbatas atau sulit dijangkau, distribusi surat suara menjadi lebih rumit dan memakan waktu lebih lama. Beberapa negara juga memiliki kondisi geografis yang mengharuskan pengiriman logistik melalui jalur yang lebih panjang atau tidak biasa, seperti daerah pedalaman atau pulau-pulau terpencil. Hal ini memerlukan perencanaan logistik yang matang agar surat suara tetap sampai dengan aman dan tepat waktu, mengingat risiko keterlambatan yang lebih besar di daerah-daerah dengan infrastruktur yang terbatas.

## **3. Masalah Keamanan dan Pengamanan Logistik**

Keamanan menjadi isu penting dalam pendistribusian logistik pemilu, mengingat surat suara merupakan dokumen yang sangat sensitif dan dapat memengaruhi hasil pemilu. Keamanan pengiriman surat suara harus diperhatikan agar tidak terjadi kehilangan, pencurian, atau manipulasi. Risiko ini terutama tinggi di daerah-daerah dengan tingkat kejahatan tinggi atau di negara-negara yang mengalami ketidakstabilan politik. Untuk memitigasi risiko ini, dibutuhkan sistem pengawasan dan pelacakan yang kuat, yang memungkinkan pihak-pihak terkait untuk memonitor pergerakan logistik dari titik pengiriman hingga penerimaan di luar negeri. Selain itu, perusahaan jasa logistik yang dipilih harus memiliki pengalaman dan prosedur keamanan yang memadai untuk menangani pengiriman surat suara.

#### **4. Hambatan Regulasi dan Kebijakan Negara Penerima**

Setiap negara memiliki kebijakan dan regulasi yang berbeda terkait pengiriman barang dari luar negeri, termasuk surat suara. Hambatan regulasi dapat mencakup pembatasan impor, pajak, atau persyaratan izin khusus yang mengatur masuknya barang-barang tertentu, termasuk surat suara. Negara penerima mungkin memiliki persyaratan administratif yang ketat atau prosedur bea cukai yang memerlukan waktu lebih lama untuk penyelesaian. Beberapa negara juga memberlakukan pembatasan atau prosedur keamanan yang lebih ketat terkait pengiriman internasional, yang dapat memperlambat proses distribusi surat suara. Untuk itu, diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah Indonesia dan negara penerima agar surat suara dapat melewati proses bea cukai dengan lancar dan tanpa hambatan.

#### **5. Pengelolaan dan Penyimpanan Logistik di Luar Negeri**

Setelah surat suara sampai di negara tujuan, tantangan berikutnya adalah bagaimana surat suara dikelola dan disimpan dengan aman sampai saat pemungutan suara. PPLN dan perwakilan Indonesia di luar negeri harus memiliki fasilitas yang memadai untuk menyimpan logistik pemilu, termasuk surat suara, dengan aman dan terorganisir. Pengelolaan yang buruk dapat mengakibatkan kerusakan pada surat suara, kebingungannya distribusi ke tempat pemungutan suara (TPS), atau bahkan hilangnya surat suara. PPLN juga harus memastikan bahwa surat suara terdistribusi secara tepat kepada pemilih yang terdaftar dan sesuai dengan prosedur pemilu yang berlaku. Proses distribusi yang tidak terorganisir atau kurangnya pengawasan dapat mempengaruhi kualitas pemilu dan tingkat partisipasi pemilih.

#### **6. Perbedaan Waktu dan Zona Waktu**

Negara-negara di luar negeri beroperasi dalam zona waktu yang berbeda, yang dapat memengaruhi jadwal pendistribusian dan penerimaan surat suara. Misalnya, jika ada kendala dalam pengiriman surat suara yang menyebabkan keterlambatan, pengelola pemilu di luar negeri harus dapat merespons dengan cepat, meskipun berada di zona waktu yang berbeda. Hal ini mengharuskan

koordinasi yang sangat efisien antara lembaga di Indonesia dan pihak-pihak yang bertugas di luar negeri, seperti KPU, PPLN, dan kedutaan besar.

#### **7. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya**

Proses distribusi logistik pemilu ke luar negeri memerlukan anggaran yang cukup besar, mulai dari biaya pengiriman, penyimpanan, hingga biaya operasional lainnya yang terkait dengan pengelolaan pemilu di luar negeri. Keterbatasan dana dapat membatasi kemampuan untuk memilih jalur distribusi yang lebih cepat dan aman, atau untuk melibatkan perusahaan logistik dengan pengalaman internasional yang lebih baik. Keterbatasan anggaran juga dapat memengaruhi efisiensi pengelolaan surat suara yang diterima di luar negeri.

#### **8. Tantangan Sosial dan Kultural**

Di beberapa negara, tantangan lain yang bisa muncul adalah ketidakpahaman atau ketidaktertarikan sebagian WNI terhadap pemilu, atau bahkan perbedaan dalam cara pandang terhadap proses pemilu itu sendiri. Koordinasi yang kurang dengan masyarakat Indonesia di luar negeri, serta kurangnya informasi tentang proses pemilu, dapat menyebabkan kesulitan dalam mendistribusikan surat suara secara efektif. PPLN dan lembaga terkait harus berupaya untuk lebih mengedukasi pemilih di luar negeri mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam pemilu.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Koordinasi lembaga pemerintahan dalam distribusi logistik pemilu surat suara ke luar negeri merupakan elemen yang sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024. Keberhasilan distribusi logistik bergantung pada sinergi antara KPU, PPLN, Kemenlu, penyedia jasa logistik, serta lembaga lainnya yang berperan dalam menjaga kelancaran distribusi. Dengan koordinasi yang baik, tantangan dalam distribusi surat suara dapat diatasi secara efektif, sehingga proses pemilu di luar negeri dapat berlangsung sukses dan berjalan sesuai jadwal. Pendistribusian logistik pemilu, khususnya surat suara, ke luar negeri merupakan tugas yang sangat kompleks dan penuh tantangan. Tantangan-tantangan ini mencakup kendala waktu, masalah geografis dan infrastruktur, isu

keamanan, regulasi negara penerima, serta masalah pengelolaan logistik di luar negeri. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan koordinasi yang baik antara KPU, PPLN, Kementerian Luar Negeri, perusahaan logistik, dan lembaga terkait lainnya, serta penggunaan teknologi untuk memastikan proses distribusi berjalan dengan efisien dan aman.

### **Saran**

Pendistribusian logistik pemilu, terutama surat suara, ke luar negeri pada Pemilu 2024 harus dilaksanakan dengan strategi yang matang agar dapat menjamin kelancaran, akurasi, dan efisiensi proses pemilu bagi WNI di luar negeri. Berdasarkan tantangan yang ada dalam proses distribusi, berikut adalah beberapa saran strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan distribusi logistik pemilu surat suara ke luar negeri berjalan dengan baik:

#### **1. Perencanaan Jadwal dan Rute Pengiriman yang Tepat**

- **Penjadwalan yang lebih fleksibel:** Agar pengiriman surat suara tidak terganggu, perlu adanya penjadwalan yang lebih fleksibel dengan mengalokasikan waktu yang cukup untuk setiap tahap pengiriman, mulai dari pengemasan hingga penerimaan di luar negeri. Penjadwalan ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti waktu tempuh, kendala geografis, dan perbedaan zona waktu antara Indonesia dan negara tujuan.
- **Optimasi rute distribusi:** Rute pengiriman harus dirancang dengan memperhitungkan waktu tempuh tercepat dan teraman. Untuk negara-negara dengan jarak jauh atau infrastruktur yang lebih lemah, perlu direncanakan pengiriman via jalur udara atau jalur logistik lainnya yang lebih efisien. Penyedia jasa logistik harus dipilih berdasarkan pengalaman mereka dalam pengiriman internasional dengan mempertimbangkan kecepatan dan keamanan.

#### **2. Penggunaan Teknologi untuk Pelacakan dan Pengawasan**

- **Sistem pelacakan berbasis teknologi:** Penting untuk mengimplementasikan sistem pelacakan berbasis teknologi (real-time tracking system) yang

memungkinkan setiap tahap pengiriman surat suara dapat dipantau secara langsung. Ini akan memastikan bahwa logistik tidak hanya sampai tepat waktu, tetapi juga aman selama perjalanan.

- **Pemanfaatan aplikasi dan platform digital:** Mengembangkan aplikasi atau platform digital yang memungkinkan pemilih di luar negeri untuk melacak status surat suara mereka, memudahkan proses koordinasi antar lembaga, dan memberikan transparansi dalam proses pendistribusian.

### **3. Koordinasi yang Lebih Intensif Antar Lembaga**

- **Koordinasi dengan PPLN dan Kedutaan:** KPU perlu memperkuat koordinasi dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara-negara tujuan. PPLN yang memiliki pemahaman lokal lebih dalam tentang kendala dan kebutuhan spesifik negara tujuan harus diberdayakan untuk mempermudah proses distribusi logistik, termasuk surat suara.
- **Kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga Terkait:** Kemenlu, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan harus terlibat dalam merancang solusi untuk masalah regulasi dan bea cukai, serta menyediakan jalur diplomatik guna memastikan kelancaran pengiriman logistik pemilu.

### **4. Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Logistik di Luar Negeri**

- **Fasilitas penyimpanan yang aman:** Perlu adanya fasilitas penyimpanan yang aman dan terorganisir dengan baik untuk surat suara di luar negeri, sehingga dapat terhindar dari kerusakan atau kehilangan. PPLN dan lembaga terkait harus memastikan bahwa surat suara disimpan dalam kondisi baik sampai saat pemungutan suara berlangsung.
- **Penggunaan jasa logistik internasional yang terpercaya:** Agar distribusi berjalan lebih efisien, penting untuk bekerja sama dengan perusahaan logistik internasional yang memiliki pengalaman dalam pengiriman barang penting dan sensitif antarnegara. Pilih penyedia jasa yang memiliki jaringan distribusi yang luas dan sistem pengamanan yang canggih.

**5. Pendanaan yang Cukup dan Pengelolaan Anggaran yang Efisien**

- **Alokasi anggaran yang lebih besar dan terencana:** Mengingat besarnya biaya yang dibutuhkan dalam distribusi logistik pemilu, termasuk surat suara, KPU perlu memastikan alokasi anggaran yang memadai dan tepat sasaran. Sumber daya keuangan yang cukup akan memastikan bahwa setiap tahap distribusi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan.
- **Transparansi pengelolaan anggaran:** Dalam rangka menghindari potensi pemborosan atau kesalahan pengelolaan anggaran, perlu adanya sistem pengawasan dan transparansi yang jelas mengenai penggunaan dana yang dialokasikan untuk distribusi logistik.

**6. Peningkatan Edukasi dan Partisipasi WNI di Luar Negeri**

- **Sosialisasi yang lebih intensif:** Agar WNI di luar negeri lebih siap dalam menggunakan hak pilih mereka, perlu adanya program sosialisasi yang lebih intensif mengenai proses pemilu, termasuk cara menggunakan surat suara dan tata cara pemungutan suara. Edukasi ini bisa dilakukan melalui media sosial, webinar, dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat Indonesia di luar negeri.
- **Pendampingan untuk pemilih:** PPLN dan perwakilan Indonesia di luar negeri harus menyediakan layanan informasi dan pendampingan bagi WNI yang ingin menggunakan hak pilihnya, seperti memberikan informasi mengenai TPS dan proses pengisian surat suara.

**7. Manajemen Krisis dan Rencana Cadangan**

- **Rencana cadangan pengiriman surat suara:** Untuk mengantisipasi kemungkinan kendala yang dapat mempengaruhi distribusi surat suara, perlu disiapkan rencana cadangan yang mencakup opsi pengiriman tambahan atau pengiriman surat suara secara bertahap. Rencana ini sangat penting jika terjadi keterlambatan atau masalah tak terduga lainnya.
- **Penanganan masalah dengan cepat:** KPU dan PPLN harus menyiapkan mekanisme penanganan masalah yang cepat, termasuk adanya tim yang khusus menangani kendala darurat yang berkaitan dengan distribusi logistik pemilu.

## **8. Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan**

- **Proses evaluasi yang komprehensif:** Setiap tahap distribusi logistik pemilu perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan tidak ada hambatan yang menghalangi jalannya distribusi surat suara. Evaluasi ini harus mencakup analisis waktu pengiriman, kondisi surat suara saat sampai, serta kepuasan pemilih.
- **Feedback dari pemilih di luar negeri:** Mengumpulkan umpan balik dari WNI yang menggunakan hak pilih mereka di luar negeri sangat penting untuk meningkatkan strategi distribusi logistik di masa depan. Hal ini dapat membantu dalam merencanakan distribusi lebih baik di pemilu berikutnya

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akhsani, R., Prayoga, S., & Shavira, A. A. (2023). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Lokasi Gudang dengan Metode Vikor Pada PT.ABC Decision Support System Warehouse location selection by VIKOR method at PT. ABC. 13(2).
- Deddy Ackbar Rianto. (2018). Landasan Manajemen Logistik. Journal of Chemical Information and Modeling, 1.
- Handadi, S. (2020). Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial) JEPANG. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7(2), 408–420.
- Komisi Pemilihan Umum. (2018). Buku Pintar Pengelolaan Logisti Pemilu/ Pemilihan. 1–56.
- Lumban Gaol, E. Y. (2022). Manajemen Pengadaan Operasional Logistik dan Distribusi Pemilu 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(2), 966–976
- Oktavia, C. W., Natalia, C., Ratanadewi, S., & Gunawan, S. (2018). Perbandingan Analisis Keputusan dalam Penentuan Lokasi Gudang Angkatan Laut Wilayah Barat. Jurnal Metris, 19(1), 37–50.
- Vikaliana, R., & Purnaya, I. N. (2019). *Optimalisasi Distribusi Surat Suara Pemilu pada Pemilihan Umum Serentak 2019. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 140-143.

*Mariska & Kusmanto (2020) berjudul " Tata Kelola Logistik Pemilu 2019 dan Malpraktek Pemilu ".*